



MEMPERTEGAS AKUNTABILITAS

DZUNUWANUS GHULAM MANAR

Mempertegas Akuntabilitas

Dzunuwanus Ghulam Manar

SANKSI PELANGGARAN
UU NO 19 TAHUN 2022 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mempertegas Akuntabilitas

Dzunuwanus Ghulam Manar



Mempertegas Akuntabilitas
Copyright© 2024 Tidar Media

Penulis : Dzunuwanus Ghulam Manar

ISBN : 978-623-5521-90-9

Cover : Pande Gunawan

Penata Letak : Matahari Agung

Penerbit : Tidar Media

Cetakan : I. Juli 2024

15 cm x 23 cm, x + 113 (halaman)

Redaksi

Jalan Kyai Asrof, Sengon, Trasan, Bandongan, Magelang.
RT03/RW03. 56151.

email: admin@tidarmedia.com

FB: www.facebook.com/tidarmedia

IG: www.instagram.com/tidar_media

web: www.tidarmedia.com

WA: 08-191-111-191-3

hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Alhamdulillah, syukur kepada Alloh SWT akhirnya saya dapat melakukan finalisasi pengembangan ide tentang akuntabilitas menjadi sebuah karya tulis dalam sebuah buku yang berjudul *Mempertegas Akuntabilitas*. Ide penulisan buku ini lahir dari kegalauan saya setiap kali menanyakan arti dan makna akuntabilitas kepada orang-orang yang saya temui, baik mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat kebanyakan. Jawabannya: akuntabilitas ya pertanggungjawaban! Jika makna akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, mengapa harus repot untuk menyandingkannya dalam konsep politik maupun pemerintahan? Dan apakah laporan pertanggungjawaban juga disebut sebagai laporan akuntabilitas? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan makna akuntabilitas yang membuat saya penasaran untuk mencari jawaban-jawabannya.

Terlepas dari beragam konsep akuntabilitas yang muncul dan beragam jenisnya, saya percaya bahwa pemahaman sebuah konsep akuntabilitas sangat penting dimiliki oleh siapa saja, terlebih mereka yang beraktivitas pada sektor politik dan pemerintahan. Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang sangat dekat dengan demokrasi dan memberikan jaminan bahwa pemilik kekuasaan atau rakyat tidak diabaikan di dalam tata kelola politik dan pemerintahan pada negara yang demokratis. Akuntabilitas sendiri bukan sebuah konsep yang kaku dan statis, namun layaknya hidup yang penuh dengan dinamika, akuntabilitas adalah konsep yang sangat dinamis berkaitan dengan hubungan kekuasaan antar aktor. Dalam operasionalnya, akuntabilitas semestinya lahir dari kesepahaman antar aktor, dalam hal ini pemilik kekuasaan (*principal*) dan pelaksana mandat kekuasaan (*agent*), untuk melakukan sebuah aktivitas dengan tujuan dan target yang

terukur secara jelas. Hal ini juga masih dilengkapi dengan implikasi-implikasi berupa penghargaan (*rewards*) atas keberhasilan dalam melaksanakan mandat kekuasaan maupun sanksi (*punishment*) atas kegagalan dalam memenuhi tujuan serta target yang telah ditetapkan.

Saya berharap buku ini dapat menawarkan perspektif yang berbeda dengan memberikan jabaran dan penjelasan atas konsep akuntabilitas secara lebih terperinci, lebih jelas, dan lengkap dengan ilustrasi aktivitas sehari-hari. Dengan demikian paling tidak pembaca mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep akuntabilitas serta operasionalisasinya dalam kehidupan keseharian.

Saya berterima kasih kepada Prof. Stephanie Anderson dan Prof. Thomas R. Seitz dari University of Wyoming, Amerika Serikat yang telah menunjukkan kepada saya konsep akuntabilitas yang sangat penting maknanya bagi pelaksanaan demokrasi dan tata kelola. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada kolega saya pada Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro yang memberi *insight* baru dalam setiap diskusi; Pak NHS, Bu Nunik Retno Herawati, Bu Rina Martini, Bu Puji Astuti, Pak Muhammad Adnan, Pak Yuwanto, Prof. Budi Setiyono, Mbak Dewi, Mbak Tiwik, MasBro Wijayanto, Mas Wahid, Mbak Lusia Astrika, Mbak Neny, Mas Budi Prasetyo serta Mbak Nastiti. Kepada kolega diskusi dan eyel-eyelan; Bu Kushandajani, Bu Fitriyah, Mbak Laila Kholid Alfirdaus, Mas Hendra Try Ardianto dan Mas Bangkit A. Wiryawan. Terima kasih untuk para senior dan kolega yang turut mewarnai tumbuh kembang nalar saya; Prof. Naili Farida, Prof. Hardi Warsono, Prof. Paramita Prananingtyas, Prof. Bulan Prabawani, Pak Turnomo Raharjo, Pak Budi Puspo Priyadi, Mbak Reni Shinta Dewi, Mas Andi Wijayanto, Mbak Sari Listyorini, Mbak Retna Hanani, Kak S. Rouli Manalu. Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada pimpinan FISIP Universitas Diponegoro; Pak Dekan Teguh Yuwono dan Bu Wakil Dekan Ika Riswanti Putranti atas kesempatan dan ruang untuk berinovasi dan mengejawantahkan akuntabilitas dalam tata kelola yang menantang. Terakhir saya harus menghaturkan banyak terima kasih kepada istri saya,

Yesika Maya Ocktarani yang penuh dengan kesabaran dan kasih sayang *nyreweti* suaminya agar tidak hanya berproses, namun juga berprogres! *Thank you for endless love and support Mommy!*

Kepada para mahasiswa, khususnya yang belajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, saya menyampaikan terima kasih atas diskusi dan interaksi kita di dalam kelas. Saya juga banyak belajar dari Anda sekalian untuk memiliki perspektif yang lebih luas, mendengarkan dan memahami realitas yang berada di luar pantauan saya.

Saya menyadari bahwa buah pemikiran ini sangat jauh dari bentuk yang ideal, untuk itu saya sangat terbuka menerima saran, masukan, dan kritik dari pembaca untuk perbaikan konsep dan penulisan buku serupa pada masa-masa mendatang. Semoga buku ini membawa manfaat untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang akuntabilitas, khususnya bagi tata kelola politik dan pemerintahan di Indonesia.

Semarang, 28 Mei 2024

Dzunuwanus Ghulam Manar

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB 1	
Mempertegas Akuntabilitas	1
BAB 2	
Demokrasi & Akuntabilitas di Indonesia	5
BAB 3	
Konsep Akuntabilitas.....	35
BAB 4	
Konsep Akuntabilitas Mulgan, Bovens, dan Behn....	49
BAB 5	
Akuntabilitas Robert D. Behn, sebuah alternatif.....	73
BAB 6	
Amanah : Membumikan Akuntabilitas.....	99
Daftar Pustaka	102
Profil Penulis	113

Untuk Ibu Siti Maesaroh, Bapak Kamali, Simak Rafi'ah Zuber
Ashari,
Iqbal, Kholfan, dan Afthin.

Terima kasih untuk hidup yang indah!

BAB I

Mempertegas Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas ataupun akuntabel dapat dengan mudah didapati dalam pelbagai wacana yang berkembang dalam masyarakat. Pada sektor pemerintah secara khusus, akuntabilitas merupakan sebuah formula untuk menjalankan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada konteks ini, pemerintahan demokratis memandang akuntabilitas sebagai sebuah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin kehendak rakyat direspons oleh para pembuat kebijakan (legislatif), dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan (eksekutif) dan rakyat memiliki hubungan atau kontak-kontak yang intensif dengan mereka yang duduk pada lembaga legislatif dan eksekutif sebagai konsekuensi dari pemerintahan demokrasi yang mereka pilih. Oleh karena itu akuntabilitas menjadi konsep yang lumrah pada aspek pemerintahan demokrasi dewasa ini. Namun demikian bagaimana dengan arti dari akuntabilitas itu sendiri?

Ketika mencari arti kata akuntabilitas atau akuntabel melalui mesin pencari pada internet, hampir dapat dipastikan bahwa kata pertanggungjawaban atau tanggung jawab menjadi kata yang mudah ditemui untuk memberi makna pada akuntabilitas. Sehingga tidak mengherankan bagi sebagian orang dengan mudahnya memaknai akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban. Bahkan di Indonesia sendiri akuntabilitas dalam pelaksanaannya disederhanakan sebagai bentuk laporan, yakni dokumen tertulis yang menjelaskan perencanaan dan pemenuhan atau pencapaian kinerja instansi pemerintah yang dikenal dengan Laporan Kinerja

Akuntabilitas Instansi Pemerintah/LAKIP¹. Dapat dipahami bahwa publik lebih mudah memaknai akuntabilitas dengan pertanggungjawaban.

Selain itu, dari diskusi dengan teman, mahasiswa, maupun masyarakat luas, kata akuntabilitas tidak memiliki makna atau penjelasan lain selain pertanggungjawaban! Jika akuntabilitas sama dengan pertanggungjawaban, lantas bagaimana penjelasan teknis operasionalnya? Lagi-lagi kita hanya terjebak kepada perangkat semantik dengan penggunaan kata-kata yang sangat kabur dan tidak dapat memberikan definisi secara jelas, bahkan sampai dengan tataran praktis operasionalnya.

Hal yang berbeda muncul pada diskusi maupun penjelasan akuntabilitas yang dilakukan oleh para ahli, secara spesifik yang berkaitan dengan politik, demokrasi maupun manajemen publik. Akuntabilitas pada konteks ini konteksnya kompleks atau tidak secara sederhana dapat dijelaskan atau digantikan dengan satu atau dua kata saja. Bahkan ketika menjelaskan akuntabilitas selalu dimaknai dengan aktor atau subyek, yakni siapa yang berakuntabilitas dan mengakuntabilitaskan, berkenaan dengan urusan seperti apa mekanisme akuntabilitas dilaksanakan dan bagaimana mekanisme akuntabilitas tersebut dijalankan.

Memberikan penjelasan atas hal-hal tersebut tentunya membutuhkan uraian yang tidak sederhana sehingga akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang membutuhkan penjelasan komprehensif serta tidak dapat diberikan istilah pengganti dengan kata yang sederhana. Bisa jadi menjelaskan atau memberi makna akuntabilitas dengan pertanggungjawaban adalah bentuk penyederhanaan atau simplifikasi yang tidak tepat atau tidak relevan.

¹ BAPPENAS, 2013

Oleh karena itu perlu adanya penegasan bahwa pada dasarnya akuntabilitas bukan semata-mata pertanggungjawaban. Perbedaan ini cukup mendasar karena hakekatnya kompleksitas penjelasan dan pelaksanaan akuntabilitas tidak dapat disederhanakan. Akuntabilitas membutuhkan penjelasan yang berkaitan dengan pelaku/aktor, urusan di antara kedua aktor dan mekanisme yang harus dijalani kedua belah pihak sebelum, pada saat dan setelah urusan tersebut dilaksanakan, termasuk implikasi bagi kedua belah pihak². Hal ini sangat penting agar istilah akuntabilitas dan pertanggungjawaban tidak membingungkan dan dipertukarkan karena memiliki perbedaan-perbedaan mendasar.

Oleh karena itu perlu untuk dapat memperjelas dan mempertegas hakekat akuntabilitas dengan mendasarkan pada konsep akuntabilitas dari beberapa pakar. Dengan demikian kita akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang akuntabilitas yang tidak semata-mata menjadi istilah semu dan kosong yang tidak dapat dijelaskan secara nyata, termasuk tataran praktis dan operasionalnya. Sebagai sebuah konsep dalam ilmu sosial, bahkan populer dalam politik dan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas perlu mendapatkan porsi yang sama dengan demokrasi, keterbukaan, maupun transparansi yang dapat didefinisikan dan dioperasionalkan. Oleh karena itu, pada pembahasan buku ini akan dijabarkan beberapa pendapat dari pakar akuntabilitas, seperti Richard Mulgan dari Australia National University, Mark Bovens dari Utrecht University, serta Robert D. Behn

² Behn, Robert D., 2001, **Rethinking Democratic Accountability**, Washington D.C., Brooking Institution Press, Goetz, Anne Marie dan Jenkins, Rob, 2005, **Reinventing Accountability: Making Democracy Work for Human Development**, New York, Macmillan Palgrave, Bovens, Mark, 2003, "Public Accountability," paper presented on **EGPA Annual Conference**.

dari Harvard Kennedy School. Melalui penjabaran atas publikasi mereka diharapkan dapat memberikan penjelasan yang cukup lengkap tentang akuntabilitas sebagai sebuah konsep yang dinamis dan mengatur hubungan antar manusia. Lebih daripada itu, penjelasan-penjelasan yang muncul juga dapat memberikan penegasan atas perbedaan antara akuntabilitas dengan pertanggungjawaban. Hal ini sangat penting agar pada masa-masa mendatang tidak lagi muncul miskonsepsi dan penyederhanaan penggunaan istilah akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Keduanya memiliki makna yang berbeda serta jabaran operasional yang berbeda pula.

BAB VI

Amanah: Membumikan Akuntabilitas

Amanah adalah sebuah konsep yang relatif sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Kata amanah merupakan serapan dari Bahasa Arab dan dengan jumlah penduduk yang dominan memeluk agama Islam dan cukup dekat dengan kebudayaan Islam maupun Arab maka amanah cukup populer baik dalam perbincangan masyarakat maupun pembelajaran agama. Secara sederhana amanah berarti dapat dipercaya, aman, tenang, atau tenteram, namun secara kompleks hal ini menyangkut sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan⁹⁶. Oleh karena itu amanah pasti menyangkut hubungan antar manusia, yang secara personal hal ini bisa menyangkut hubungan antara 2 orang, maupun hubungan seseorang dengan orang banyak dalam konteks komunal yang lebih luas.

Amanah adalah sebuah nilai kebajikan yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Konsep amanah sangat dekat dengan jujur, dapat dipercaya, serta tanggung jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab, maka pada dasarnya amanah menyodorkan se bentuk tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Jika tidak, maka yang muncul adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berujung kepada kehancuran dan kerugian⁹⁷. Secara lebih luas amanah merupakan pengikat hubungan interpersonal karena tanpa amanah kehidupan manusia akan hancur, tidak ada rasa saling percaya, serta

⁹⁶ KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/amanah-2>

⁹⁷ Admizal, Iiril, Taquyuddin, M, Andika, Titin., 2020., “*Amanah dan Khianat dalam Al-Qur’an menurut Quraish Shihab.*” **Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir** Vol. 05 No. 02

terjadi penghianatan dan permusuhan⁹⁸. Hal ini tentu tidak saja berlaku pada level individu, namun juga berlaku pada level yang lebih luas (komunal) seperti pada organisasi, bisnis, komunitas, maupun negara. Adanya amanah menjadikan manusia dapat menghilangkan atau mengatasi kebodohan, ketidakadilan, penghianatan sehingga dapat menciptakan hidup yang lebih damai dan lebih baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa amanah merupakan beban kewajiban (*taklif*) yang harus dijaga atau ditunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah dijanjikan atau diamanahkan.

Secara singkat, konsep amanah setara dengan akuntabilitas karena paling tidak memenuhi beberapa kriteria, seperti adanya hubungan antara 2 pihak, adanya perjanjian atau kesepakatan berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaksanakan atau ditunaikan, serta adanya implikasi berupa dampak positif berupa keamanan, kedamaian, ketenangan, tujuan yang tercapai dan sejenisnya. Sebaliknya apabila tidak terlaksana maka akan muncul dampak negatif berupa kerugian, kehancuran, permusuhan dan ketidaktenangan.

Satu hal yang belum nampak dalam implementasi amanah jika dibandingkan dengan akuntabilitas adalah belum munculnya mekanisme diskusi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan, serta implikasi apabila hal tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. Pada konteks amanah, implikasi lebih bersifat alamiah ketimbang sebagai tindakan aktif dari pihak-pihak yang memberikan amanah atau kuasa. Namun demikian, secara paralel terdapat hal-hal yang memiliki kesamaan, baik dalam proses maupun dampak atau akibat.

Oleh karena itu, amanah dapat dijadikan sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk memahami akuntabilitas secara lebih komprehensif. Hal ini bisa menjadi strategi agar amanah

⁹⁸ Agung, Muhammad Ivan., 2021, "*Psikologi Amanah: Konsep, Pengukuran, Tantangan*" *Buletin Psikologi* Vol. 29 No. 2: 187-203.

maupun akuntabilitas dapat saling melengkapi dan berjalan bersama. Lebih daripada itu, manfaat yang diperoleh dari implementasi amanah dan akuntabilitas akan berkontribusi kepada perbaikan dan peningkatan tata kelola politik, pemerintahan maupun dimensi-dimensi kehidupan manusia yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdellatif, Adel M., “*Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development*,” Makalah workshop Demokrasi, Pembangunan Ekonomi dan Budaya *Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity*, Seoul 20-31 Mei 2003.
- Admizal, Iiril, Taquyuddin, M, Andika, Titin., 2020., “*Amanah dan Khianat dalam Al-Qur’an menurut Quraish Shihab.*” **Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir** Vol. 05 No. 02
- Aditjondro, George Junus, 2006, **Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa**, Jakarta, LkiS.
- Adsera, Alicia, et.all, 2003, “*Are You Being Served? Political Accountability and Quality of Government*,”**The Journal of Law, Economics, and Organization** Vol. 19 No. 2.
- Agung, Muhammad Ivan., 2021, “*Psikologi Amanah: Konsep, Pengukuran, Tantangan*” **Buletin Psikologi** Vol. 29 No. 2: 187-203.
- Ahyaruddin, Muhammad, Akbar, Rusdi, 2017 “*Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu atau Nyata?*,” **Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia** Vol. 21 No. 2: 105-117
- Alam, Wawan Tunggul, 2003, **Demi Bangsa: Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

- Almond, Gabriel dan Verba, Sydney, 1989, **The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations**, California, Sage Publications.
- Almond, Gabriel, et.al., 2004, **Comparative Politics Today: A World View**, New York, Pearson Longman.
- Argyriades, Demetrios, 2006, “*Good Governance, Professionalis Ethics, and Responsibility,*” **International Review of Administrative Sciences**.
- Axworthy, Thomas S., 2005, “The Accountability Ladder: Five Steps toward Democracy,” **World Forum for Democratization in Asia**.
- Bickers, Kenneth N. dan Williams, John T. , 2001, **Public Policy Analysis: A Political Economic Approach**, New York, Houghton Mifflin Company.
- Behn, Robert D., 2003, “*Why Measure Performance? Different purposes Require Different Measure,*” **Public Administration Review**.
- Behn, Robert D., 2001, **Rethinking Democratic Accountability**, Washington D.C., Brooking Institution Press.
- Behn, Robert D., 1998 “The New Public Management Paradigm and the Search for Democratic Accountability,” **International Public Management Journal** No. 1 Vol. 2.
- Behn, Robert D., 1996, “*Public Management: Should It Strive to be Art, Science, or Engineering?,*” **Journal of Public Administration Research and Theory**.
- Behn, Robert D., 1992, “*Wild Ideas*” about Public Management,” **Journal of Policy Analysis and Management**.

- Bhakti, Ikrar Nusa, 2003, "The Transition to Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems," **Asia Pacific Center for Security Studies**.
- Blackwell, Christopher W., "Athenian Democracy: an overview," in C. Blackwell (ed), *Demos: Classical Athenian Democracy* (A. Mahoney and R. Scaife, edd, *The Stoa: the consortium of electronic publication in the humanities*) www.stoa.org.
- Bovens, Mark, 2005, "From Financial Accounting to Public Accountability," on H. Hill (ed). *Bestansaufnahme und Perspektiven des Haushalts und Finanzmanagements*, Baden Baden, Nomos Verlag.
- Bovens, Mark, 2003, "Public Accountability," paper presented on **EGPA Annual Conference**.
- Bovens, Mark, 2007, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," **European Law Journal** Vol. 13 No. 4.
- Bovens, Mark, 2006, "Analyzing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework," **European Governance Paper (EUROGOV)** No. C-06-01.
- Bovens, Mark, 2005. Public Accountability dalam E. Ferlie, L. Lynne & C. Pollitt (eds.), **The Oxford Handbook of Public Management**, Oxford, Oxford University Press. www.built-environment.uwe.ac.uk.
- Bovens, Mark, 2010, "Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism," **West European Politics** Vol. 33, No. 5.
- Bovens, Mark, 2005, "From Financial Accounting to Public Accountability," on H. Hill (ed). *Bestansaufnahme*

und Perspektiven des Haushalts und Finanzmanagements, Baden Baden, Nomos Verlag.

- Bresnan, John (ed.), 2005, **Indonesia: The Great Transition**, Maryland, Rowman & Littlefield Publisher.
- Brown, Richard, Gallagher, Thomas dan Williams, Meredith, 1982, **Auditing Performance in the Government**, New York, A Ronald Press Production.
- Bossuyt, Jean, Vanheukelom, Jan, Aggad, Faten, Herrero-Cangas, Alisa, Keijzer, Niels, 2010, “*Supporting Democratic Accountability: Exploring Conceptual Dimensions and Operational Challenges*,” **European Center for Development Policy Management**, Discussion Paper No.93.
- Cameron, Wayne, 2004, “Public Accountability: Effectiveness, equity, ethics,” **Australian Journal of Public Administration**.
- Carey, John dan Reynolds, Andrew, 2007, “Parties and Accountable Government in New Democracies,” **Party Politics** 13.
- Crik, Bernard, 2002, **Democracy: A Very Short Introduction**, Oxford, Oxford University Press.
- Diamond, Larry dan Morlino, Leonardo, 2004, “The Quality of Democracy: An Overview,” **Journal of Democracy** Vol. 15 No. 14.
- Druke, Helmut, 2007, “Can E-Government Make Public Governance more Accountable?” dalam **Performance Accountability and Combating Corruption**, Anwar Shah (ed.), Washington DC, The World Bank.
- Dwivedi, O.P, 2002, “*Review of Rethinking Democratic Accountability*,” **Political Science Quarterly**.

- Eklof, Stefan, 2003, **Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order 1968-1998**, Copenhagen, Nias Press.
- Epstein, Davis dan O'Halloran, Sharyn, 1999, **Delegating Power**, New York, Cambridge University Press.
- Erkkila, Tero, 2007, "*Governance and Accountability – A Shift in Conceptualisation,*" **Public Administration Quarterly**, Spring.
- Evans, Stephen. C. , 2023, **Living Accountably : Accountability as a Virtue**, Oxford., Oxford University Press.
- Feith, Herbert, 1963, "Indonesia's Political Symbols and Their Wielders," **World Politics**, Vol. 16 No. 1.
- Gaffar, Afan, **Javanese Voter: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System** disertasi pada Ohio State University, 1988.
- Gerring, John, 2007, **Case Study Research: Principles and Practices**, New York, Cambridge University Press.
- Gibson, Pamela, et.all, "*Improving Performance and Accountability in Local Government with Citizen Participation,*" **The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal** Vol 10 (1).
- Goetz, Anne Marie dan Jenkins, Rob, 2005, **Reinventing Accountability: Making Democracy Work for Human Development**, New York, Macmillan Palgrave.

- Hancock, Dawson R. & Algozzine, Bob, 2006, **Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginner Researcher**, New York, Teachers College Press.
- Holzner, Burkart dan Holzner, Leslie, 2006, **Transparency in Global Change** Pittsburg, University of Pittsburg Press.
- Huntington, Samuel P., 1991, **the Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century**, University of Oklahoma Press, Oklahoma.
- Jiang, Yi-Huah, “*Asian Values and Communitarian Democracy*,” Department of Political Science National Taiwan University.
- Kamrava, Mehran, 1995 “*Political Culture and a New Definition of the Third World*,” **Third World Quarterly** Vol. 16.
- Kawamura, Koichi, 2002, “Politics of the 1945 Constitution: Democratization and Its Impact on Political Institutions in Indonesia,” **Institute of Development Economies Research Paper** No. 3.
- Keohane, Robert O., 2006 “Accountability in World Politics,” **Scandinavian Political Studies**, Vol. 29 No. 2.
- Kingsbury, Damien, 1998, **The Politics of Indonesia**, Melbourne, Oxford University Press.
- Kloot, Louise, 1999, “Performance Measurement and Accountability in Victorian Local Government,” **The International Journal of Public Sector Management** Vol. 12 No. 7.
- Kobrak, Peter, 2002, “*Review of Rethinking Democratic Accountability*,” **American Political Science Review**.

- Lane, Ruth, 1992, "*Political Culture: Residual Category or General Theory*," **Comparative Political Studies**.
- Langguth, Gerd, 2003, "*Asian Values Revisited*," **Asia Europe Journal** 1.
- Landauer, Matthew, 2019, **Accountability and Advice in Ancient Greece**, Chicago., The University of Chicago Press.
- Lawrence E. Harrison dan Samuel E. Huntington, **Culture Matters: How Value Shape Human Progress**, New York, Basic Books.
- Lawson, Stephanie, 2006, **Culture and Context in the World Politics**, New York, Palgrave Macmillan.
- Lemarchand, Rene dan Legg, Keith, 1972, "*Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis*," **Comparative Politics**, Vol. 4 No. 2.
- Liddle, R. William," Indonesia's Democratic Transition: Playing by The Rules.
- Liddle, R. William, 1992, "*Indonesia's Democratic Past and Future*," **Comparative Politics** Vol. 24 No. 4.
- Moncriefte, Joy Marie, 1998 "*Reconceptualizing Political Accountability*," **International Political Science Review** Vol. 19 No. 4.
- Martin, Douglas, Giacomini, Mita, and Singer, Peter. A, 2002, "*Fairness Accountability for Reasonableness, and the Views of Priority Setting Decision-Makers*," **Health Policy** 61.
- Mulgan, Richard, 2003, **Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies**, New York, Macmillan Palgrave.

- Mulgan, Richard, 2002, “*Public Accountability of Provider Agencies: the Case of the Australian ‘Centrelink’*,” **International Review of Administrative Science** Vol. 68.
- Mulgan, Richard, 1997, “*Contracting Out and Accountability*,” Discussion Paper 51.
- Mitnick, Barry M., 2006, “Origin of the Theory of Agency: An Account By One of the Theory's Originators,” 2-3 diakses melalui http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1020378
- Morfit, Michael, 1981, “Pancasila: The Indonesian State Ideology According to The New Order Government,” **Asian Survey**, Vol. 21 No. 8.
- Nanda, Ved P, 2006 “*The Good Governance Concept Revisited*,” **The Annals of The American Academy**.
- Payne, Richard dan Nassar, Jamal, 2007, **Politics and Culture in the Developing World**, New York, Longman Pearson.
- Pinkey, Robert, 2004, “*Selling Democracy Abroad or Rescuing it at Home? The Hazard of Democracy Promotion*,” **The Round Table**, Vol. 93 No. 375.
- Przeworski, Adam, Stokes, Susan dan Manin, Bernard, 1999, **Democracy, Accountability and Representation** New York, Cambridge University Press.
- Pursley, Nancy P., 2002, “*A Review of Rethinking Democratic Accountability*,” **Public Policy and Practice**.
- Pye, Lucian W., 1991, “*Political Culture Revisited*,” **Political Psychology**.

- Qingxue, Liu, 2003, “*Understanding Different Cultural Patterns or Orientations between East and West,*” **Investigationes Linguisticae** Vol IX, Poznan, April 2003.
- Reid, Anthony, 1998, “*Political “Tradition” in Indonesia: The One and The Many*” **Asian Studies Review** Vol. 22 No. 1.
- Reiss, Dorit, 2007, “*Accountability Strategies.*” Paper presented at the *Annual Meeting of APSA*.
- Roberts, Jennifer Tolbert, 1982, **Accountability in Athenian Government**, Madison, The University of Wisconsin Press.
- Robertson-Snape, Fiona, 1999, “Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia,” **Third World Quality** Vol. 20 No. 3.
- Rochwulaningsih, Yetty, *Keragaman Adat dan Tradisi di Jawa Tengah dari Masa ke Masa*, makalah dipaparkan pada Diskusi Nasional Pemberdayaan Lembaga Adat, Grobogan 18-19 Maret 2009.
- Rosenbloom, David H., 2002, “*A Review of Rethinking Democratic Accountability,*” **The Journal of Politics**.
- Roy, Deny, 1994, “*Singapore, China, and the “Soft Authoritarian” Challenge,*” **Asian Survey**, Vol. 34, No. 3.
- Santoso, Riyadi, 2012 “*Catatan Mengenai Perkembangan Akuntabilitas Publik pada Era Demokrasi di Indonesia*” **Jurnal AKP** Vol. 1 No. 1: 55-66
- Schmitter, Phillippe dan Karl, Terry Lynn, 1991, “Democracy is ... and is not,” **Journal of Democracy** Vol. 2 No.3.

- Scott, James, 1972, "*Patron-Client Politics in South East Asia*," **American Political Science Review** Vol. 66 No. 1.
- Sen, Amartya, 1997, "*Human Rights and Asian Values*", **The New Republic** Vol. 217.
- Suhelmi, Ahmad, 2001, **Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto, Ayu, 2006, "*Becoming a True Javanese, A Javanese View of Attempts at Javanisation*", **Indonesian and the Malay World** Vol. 34 No. 98.
- Suwardi, Paham Kekuasaan Jawa dalam Budaya Politik Orde Baru dan Reformasi, makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pengembangan Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah, Yogyakarta 26 September 2005.
- Syaflan, Meidi, Sulistiarini, Eni, 2022 "*Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.*" **Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia** Vol. 2 No. 3: 928-941
- Tansey, Stephen D. dan Jackson, Nigel, 2008, **Politics, the Basics**, New York, Routledge.
- Teik, Goh Chong, 1972, "Why Indonesia's Attempt at Democracy in the Mid-1950s Failed," **Modern Asian Studies**, Vol. 6 No. 2.
- Teune, Henry, 2002 "Global Democracy," **The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science** Vol. 581 No. 22.

Thompson, Mark R., 2004, “*Pacific Asia after ‘Asian Values’: authoritarianism, democracy, and ‘good government’*” **Third World Quarterly** Vol. 25 No. 6.

Uhlen, Anders, 1993, “Transnational Democracy Diffusion and Indonesian Democracy Discourse,” **Third World Quarterly** Vol. 14, No 3.

Wicaksono, Kristian Widya, 2015 “*Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik,*” **Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik** Vol. 19 No. 1: 3-12

Majalah TEMPO 2010 edisi 100 tahun Muhammad Hatta.

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.web.id/amanah-2>

“*Promoting Transparency and Accountability: USAID’s Anti-Corruption,*” Centre for Democracy and Governance, Bureau for Global Programs, Field Support, and Research, US Agency for International Development, Januari 2000.

PROFIL PENULIS

Dzunuwanus Ghulam Manar adalah seorang pembelajar kebijakan, inovasi, dan tata kelola pemerintahan. Lahir di Wonosobo pada 20 Agustus 1977 dan mengenyam pendidikan pada program studi sarjana Ilmu Pemerintahan dan pasca sarjana Ilmu Politik di Universitas Diponegoro.

Saat ini bekerja sebagai tenaga pendidik pada almamaternya dan menekuni inovasi kebijakan pada ranah pemerintah daerah. Selain melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, penulis juga aktif bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan *policy brief* serta diskusi-diskusi inovasi pemerintahan. Selain itu juga tergabung dalam konsorsium *Evidence-Based Policy Development Network (EBPDN)* yang merupakan jejaring ilmuwan dan pelaku kebijakan dari seluruh dunia.

Penulis dapat dihubungi melalui:

ghulam@lecturer.undip.ac.id

dgmanar@yahoo.com.

Apakah akuntabilitas sama dengan pertanggungjawaban?

Jawabnya tentu tidak!

Lantas bagaimana penjelasannya? Bagi sebagian orang secara sederhana menyamakan akuntabilitas dengan pertanggungjawaban. Padahal jika dirunut dari proses dan substansinya, akan ditemukan beberapa hal yang membedakan pertanggungjawaban dengan akuntabilitas.

Buku ini mencoba untuk memberikan sebuah perspektif tentang akuntabilitas, khususnya yang terkait dengan politik dan pemerintahan. Pemahaman sebuah konsep akuntabilitas sangat penting dimiliki oleh siapa saja, terlebih mereka yang beraktivitas pada sektor politik dan pemerintahan. Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang sangat dekat dengan demokrasi dan memberikan jaminan bahwa pemilik kekuasaan atau rakyat tidak diabaikan di dalam tata kelola politik dan pemerintahan pada negara yang demokratis. Akuntabilitas sendiri bukan sebuah konsep yang kaku dan statis, namun layaknya hidup yang penuh dengan dinamika, akuntabilitas adalah konsep yang sangat dinamis berkaitan dengan hubungan kekuasaan antar aktor. Dalam operasionalnya, akuntabilitas semestinya lahir dari kesepahaman antar aktor, dalam hal ini pemilik kekuasaan (*principal*) dan pelaksana mandat kekuasaan (*agent*), untuk melakukan sebuah aktivitas dengan tujuan dan target yang terukur secara jelas. Hal ini juga masih dilengkapi dengan implikasi-implikasi berupa penghargaan (*rewards*) atas keberhasilan dalam melaksanakan mandat kekuasaan maupun sanksi (*punishment*) atas kegagalan dalam memenuhi tujuan serta target yang telah ditetapkan.

Buku ini memberikan perspektif yang berbeda dengan memberikan jabaran dan penjelasan atas konsep akuntabilitas secara lebih terperinci, lebih jelas, dan lengkap dengan ilustrasi aktivitas sehari-hari. Dengan demikian paling tidak pembaca mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep akuntabilitas serta operasionalisasinya dalam kehidupan keseharian.



TIDAR MEDIA

email : admin@tidarmedia.com

web : www.tidarmedia.com

978-623-5521-90-9



9 786235 521909